

## IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PELAYANAN PUBLIK PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU (PPDB) DI SMK AL BADAR CIPULUS PURWAKARTA

Rindiyani<sup>1</sup>, Ahmad Sirojudin<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup> *Manajemen Pendidikan Islam, STAI Al Badar Cipulus Purwakarta*

Email: <sup>1</sup>[rindianihamzah27@gmail.com](mailto:rindianihamzah27@gmail.com), <sup>2</sup>[siroj030402@gmail.com](mailto:siroj030402@gmail.com)

### Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan pelayanan publik Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) secara daring di SMK Al Badar. Pelaksanaan PPDB online mengacu pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan PPDB online di SMK Al Badar telah berjalan cukup baik jika ditinjau dari aspek komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Proses komunikasi antara Dinas Pendidikan, pihak sekolah, panitia PPDB, dan masyarakat berlangsung efektif serta didukung oleh pemanfaatan media informasi yang mudah diakses. Ketersediaan sumber daya manusia, sarana prasarana, jaringan internet, serta dukungan pendanaan dari dana BOS turut menunjang keberhasilan pelaksanaan kebijakan. Disposisi pelaksana ditunjukkan melalui komitmen dan sikap positif dalam melaksanakan PPDB secara adil dan ramah. Struktur birokrasi dan Standar Operasional Prosedur (SOP) juga telah diterapkan dengan baik. Faktor pendukung meliputi partisipasi publik dan kejelasan standar kebijakan, sedangkan faktor penghambat berupa kendala zonasi dan kurangnya sosialisasi kepada masyarakat.

**Kata Kunci:** Implementasi Kebijakan, Pelayanan Publik dan PPDB.

### Abstract

*This study aims to analyze the implementation of the online New Student Admission (PPDB) public service policy at SMK Al Badar. The implementation of online PPDB refers to the Regulation of the Minister of Education and Culture of the Republic of Indonesia Number 1 of 2021 concerning New Student Admission. The results of the study show that the implementation of the online PPDB policy at SMK Al Badar has been quite successful in terms of communication, resources, disposition, and bureaucratic structure. The communication process between the Education Office, the school, the PPDB committee, and the community has been effective and supported by the use of easily accessible information media. The availability of human resources, infrastructure, internet networks, and funding support from the School Operational Assistance (BOS) fund also contributed to the successful implementation of the policy. The disposition of the implementers is demonstrated through their commitment and positive attitude in implementing the PPDB fairly and amicably. The bureaucratic structure and Standard Operating Procedures (SOP) have also been implemented well. Supporting factors include public participation and*

*clarity of policy standards, while inhibiting factors include zoning constraints and a lack of socialization to the community.*

**Keywords:** *Policy Implementation, Public Service and PPDB.*

## **PENDAHULUAN**

Pendidikan merupakan landasan utama dalam proses pembangunan dan pembentukan kualitas sumber daya manusia. Untuk menghasilkan sumber daya manusia yang bermutu, diperlukan pula layanan pendidikan yang berkualitas. (Khoironi et al., 2022) Dalam hal ini, pemerintah memegang peranan yang sangat penting dalam mewujudkan layanan pendidikan yang bermutu agar tercipta sumber daya manusia yang unggul. Sekolah sebagai lembaga pendidikan formal memiliki tanggung jawab untuk menyelenggarakan layanan pendidikan yang berkualitas. Berdasarkan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Tahun 2003 Pasal 11 Ayat (1), pemerintah dan pemerintah daerah berkewajiban menyediakan layanan dan kemudahan serta menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi seluruh masyarakat tanpa diskriminasi, dengan mengutamakan kepuasan peserta didik (Mariani et al., 2024).

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang berlangsung sangat cepat saat ini, baik disadari maupun tidak, telah membawa perubahan pada pola pikir, budaya, cara pandang, serta perilaku masyarakat. Salah satu bentuk perkembangan tersebut adalah hadirnya teknologi komputer. Keberadaan komputer memberikan pengaruh yang besar terhadap berbagai aspek kehidupan manusia, khususnya dalam bidang pendidikan. Di sisi lain, kemajuan teknologi juga menuntut dunia pendidikan untuk memanfaatkannya secara optimal dalam penyelenggaraan layanan pendidikan di Indonesia agar tidak tertinggal dari negara lain.

Ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) senantiasa mengalami kemajuan yang sangat pesat dari waktu ke waktu. Seiring dengan perkembangan teknologi tersebut, masyarakat menjadi semakin diuntungkan dan membutuhkan informasi yang cepat serta akurat, karena informasi merupakan unsur penting dalam membangun komunikasi yang efektif. Teknologi informasi kini semakin mudah diakses oleh siapa saja dan dari mana saja, berkat tersedianya media informasi dan komunikasi yang semakin canggih.

Sejalan dengan perkembangan tersebut, pelaksanaan penerimaan peserta didik baru saat ini juga dilaksanakan melalui sistem online. Banyak sekolah telah menerapkan sistem Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) berbasis daring, termasuk Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) di Provinsi Jawa Barat. Pada jenjang SMK, proses PPDB telah diselenggarakan secara online sebagai bagian dari upaya meningkatkan efektivitas dan efisiensi layanan pendidikan. PPDB online merupakan salah satu mekanisme penerimaan peserta didik baru yang dikelola oleh Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat serta terintegrasi dengan seluruh SMK yang berada di wilayah tersebut. Pelaksanaan PPDB online ini berlandaskan pada Permendikbud Nomor 44 Tahun 2019 yang kemudian disempurnakan melalui Peraturan Menteri Pendidikan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada jenjang Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan (Akmad et al., 2022).

Berdasarkan peraturan tersebut, pelaksanaan PPDB secara online bertujuan untuk memberikan kesempatan yang setara bagi seluruh masyarakat dalam memperoleh layanan penerimaan peserta didik baru yang cepat, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan. Proses pelaksanaan PPDB ini berpedoman pada Permendikbud Nomor 1 Tahun 2021.

## **KAJIAN TEORI**

### **1. Kebijakan Publik**

Kebijakan publik merupakan serangkaian keputusan dan tindakan yang ditetapkan oleh pemerintah untuk mengatasi persoalan publik dan mencapai tujuan tertentu. Dye mendefinisikan kebijakan publik sebagai “whatever governments choose to do or not to do,” yang menegaskan bahwa kebijakan mencakup tindakan aktif maupun keputusan untuk tidak bertindak (Dye, 1992). Dalam konteks pendidikan, kebijakan publik berfungsi sebagai instrumen pengatur yang mengarahkan penyelenggaraan layanan pendidikan agar berjalan sesuai dengan prinsip keadilan, efektivitas, dan akuntabilitas.

Di Indonesia, kebijakan publik di bidang pendidikan diimplementasikan melalui berbagai regulasi, termasuk kebijakan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) yang bertujuan menjamin pemerataan akses pendidikan dan transparansi proses seleksi. Kebijakan PPDB menjadi bentuk konkret intervensi negara dalam mengatur mekanisme penerimaan peserta didik agar sejalan dengan amanat konstitusi dan prinsip pelayanan public (Winarno, 2014).

### **2. Implementasi Kebijakan Publik**

Implementasi kebijakan merupakan tahap krusial dalam siklus kebijakan publik karena pada tahap inilah kebijakan yang telah dirumuskan diterjemahkan ke dalam tindakan nyata. Menurut Mazmanian dan Sabatier, implementasi kebijakan adalah proses pelaksanaan keputusan kebijakan dasar yang biasanya dituangkan dalam bentuk undang-undang, peraturan pemerintah, atau keputusan eksekutif (Mazmanian, 1983).

Model implementasi kebijakan yang banyak digunakan dalam kajian pendidikan adalah model George C. Edward III yang menekankan empat variabel utama, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi (sikap pelaksana), dan struktur birokrasi. Keempat faktor ini saling berkaitan dan sangat menentukan keberhasilan atau kegagalan implementasi kebijakan (Edward III, 1980). Dalam implementasi kebijakan PPDB, kejelasan komunikasi kebijakan kepada masyarakat (Edwards, 1980), ketersediaan sumber daya manusia dan teknologi, komitmen pelaksana di tingkat sekolah, serta prosedur birokrasi yang sederhana menjadi faktor penentu keberhasilan pelayanan PPDB.

### **3. Pelayanan Publik**

Pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan layanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik (Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009). Sekolah

sebagai institusi pendidikan formal merupakan bagian dari penyelenggara pelayanan publik, terutama dalam layanan administratif pendidikan seperti PPDB.

Pelayanan publik yang berkualitas harus memenuhi prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipatif, kesetaraan, serta kepastian hukum. Sinambela (2019) menegaskan bahwa pelayanan publik yang baik tidak hanya berorientasi pada prosedur, tetapi juga pada kepuasan masyarakat sebagai pengguna layanan. Oleh karena itu, kebijakan PPDB tidak hanya dinilai dari kesesuaian regulasinya, tetapi juga dari bagaimana kebijakan tersebut dirasakan oleh masyarakat, khususnya calon peserta didik dan orang tua.

#### **4. Kebijakan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB)**

PPDB merupakan kebijakan publik di bidang pendidikan yang mengatur mekanisme, persyaratan, dan prosedur penerimaan peserta didik baru pada satuan pendidikan. Kebijakan ini dirancang untuk menjamin akses pendidikan yang adil, transparan, dan non-diskriminatif. Di Indonesia, kebijakan PPDB diatur melalui peraturan menteri pendidikan yang diperbarui secara berkala sesuai dengan kebutuhan dan dinamika masyarakat.

Implementasi kebijakan PPDB menuntut kesiapan sekolah dalam aspek administratif, sumber daya manusia, serta pemanfaatan teknologi informasi. Menurut Mulyasa (2021), keberhasilan PPDB sangat dipengaruhi oleh kemampuan sekolah dalam menerjemahkan regulasi ke dalam prosedur operasional yang mudah dipahami oleh masyarakat. Dengan demikian, PPDB bukan sekadar proses seleksi peserta didik, melainkan juga cerminan kualitas tata kelola dan pelayanan publik di satuan pendidikan.

#### **5. Implementasi Kebijakan PPDB sebagai Pelayanan Publik**

Implementasi kebijakan PPDB dapat dipahami sebagai praktik pelayanan publik di bidang pendidikan yang langsung bersentuhan dengan masyarakat. Proses pendaftaran, seleksi, hingga pengumuman hasil PPDB merupakan rangkaian layanan administratif yang harus dilaksanakan secara profesional, transparan, dan akuntabel. Kegagalan dalam salah satu tahapan tersebut berpotensi menimbulkan ketidakpuasan publik dan menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi pendidikan (Dwiyanto, 2021).

Dalam perspektif implementasi kebijakan, PPDB di tingkat sekolah sangat dipengaruhi oleh kapasitas pelaksana kebijakan, dukungan sarana prasarana, serta koordinasi antar pemangku kepentingan. Oleh karena itu, studi mengenai implementasi kebijakan pelayanan publik PPDB menjadi penting untuk menilai sejauh mana kebijakan tersebut telah dijalankan sesuai dengan tujuan yang ditetapkan serta mengidentifikasi faktor-faktor penghambat dan pendukung dalam pelaksanaannya.

### **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menerapkan metode deskriptif kualitatif dengan tujuan untuk mengetahui pelaksanaan kebijakan pelayanan publik dalam penerimaan peserta didik baru di SMK Al Badar. Pendekatan kualitatif digunakan untuk menggali dan memahami fenomena utama yang diteliti. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi dan

dokumentasi yang diperoleh dari operator sekolah. Selanjutnya, hasil wawancara dianalisis dengan merujuk pada teori-teori yang digunakan sebagai dasar pemikiran.

Menurut Sharan B dan Merriam dalam Sugiyono (2018:4), penelitian kualitatif berfokus pada upaya memahami cara individu menafsirkan pengalaman yang mereka alami serta bagaimana mereka membangun makna dari pengalaman hidup tersebut. Tujuan utama penelitian kualitatif adalah memperoleh pemahaman yang mendalam tentang perasaan, makna, dan proses penafsiran individu terhadap pengalaman hidupnya. Oleh karena itu, penelitian kualitatif berusaha memahami fenomena berdasarkan sudut pandang partisipan atau perspektif internal (emic), bukan berdasarkan pandangan peneliti atau perspektif eksternal (etic) (Putra et al., 2023).

Nutley dan Webb dalam Sugiyono (2017:10) menjelaskan bahwa penelitian kebijakan dirancang untuk memberikan informasi serta pemahaman mengenai satu atau beberapa aspek yang dapat dimanfaatkan dalam proses kebijakan, mulai dari perumusan dan pembuatan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, hingga evaluasi kebijakan. Penelitian kebijakan memiliki peran dalam penyusunan kebijakan, menghasilkan output dan outcome kebijakan, serta melakukan evaluasi terhadap kebijakan tersebut. Sementara itu, Moleong (2011:6) menyatakan bahwa penelitian kualitatif merupakan penelitian yang bertujuan untuk memahami secara menyeluruh berbagai fenomena yang dialami oleh subjek penelitian, seperti perilaku, persepsi, motivasi, dan tindakan, melalui penggambaran dalam bentuk kata-kata dan bahasa pada konteks alamiah tertentu dengan memanfaatkan beragam metode alamiah (Safrida et al., 2025).

Pendekatan kualitatif diharapkan mampu menghasilkan uraian yang mendalam mengenai ucapan, tulisan, serta perilaku yang dapat diamati dari individu, kelompok, masyarakat, maupun organisasi tertentu. Penggunaan desain penelitian deskriptif kualitatif dalam penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan implementasi kebijakan pelayanan publik dalam penerimaan peserta didik baru di SMK Al Badar.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **1. Implementasi Kebijakan Pelayanan Publik Penerimaan Peserta Didik Baru di SMK Al Badar**

Pelaksanaan PPDB secara daring di SMK Al Badar dilaksanakan dengan mengacu pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan (Ismail & Yulvianda, 2022). Berdasarkan hasil analisis penelitian maka dapat diuraikan sebagai berikut:

#### **a. Komunikasi**

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan, penulis menganalisis bahwa proses transmisi komunikasi, baik antara pihak Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dengan pihak SMK Al Badar maupun komunikasi internal di lingkungan SMK Al Badar, berjalan dengan cukup baik. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan bersikap kooperatif sehingga koordinasi dengan pihak sekolah dapat terlaksana secara efektif. Pihak sekolah juga menetapkan kebijakan yang dinilai cukup baik dengan memberikan

keleluasaan kepada Koordinator PPDB online SMK Al Badar untuk melakukan komunikasi langsung dengan pihak dinas melalui aplikasi WhatsApp. Selain itu, komunikasi antar panitia PPDB juga berlangsung dengan baik, di mana ketua panitia mampu mengoordinasikan seluruh anggota panitia secara optimal sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing.

Dari aspek kejelasan komunikasi, implementasi kebijakan publik di sekolah telah berjalan dengan cukup baik. Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan calon peserta didik, diketahui bahwa proses PPDB online dapat dipahami dengan jelas karena informasinya mudah diakses dan dapat dilihat kapan saja. Informasi tersebut tersedia melalui papan pengumuman sekolah maupun media sosial. Meskipun demikian, masih terdapat sebagian orang tua calon peserta didik yang mengalami kesalahpahaman terkait mekanisme PPDB online karena sistem tersebut merupakan hal baru bagi mereka. Namun, panitia PPDB mampu memberikan penjelasan dan pendampingan sehingga permasalahan tersebut dapat diselesaikan.

#### **b. Sumber Daya**

Suatu kebijakan dalam pelaksanaannya membutuhkan dukungan sumber daya, baik sumber daya manusia maupun sumber daya nonmanusia. Sumber daya yang dimaksud meliputi sumber daya manusia, sumber daya keuangan, serta sumber daya waktu. Meskipun perencanaan telah disusun dengan baik dan tujuan kebijakan sangat mulia, tanpa dukungan sumber daya yang memadai maka kebijakan tersebut tidak akan dapat berjalan secara optimal. Sumber daya manusia merupakan potensi kekuatan yang berasal dari individu-individu yang dapat dimanfaatkan oleh organisasi (Sutrisno, 2016). Selain itu, sumber daya manusia juga dipahami sebagai daya yang bersumber dari manusia yang dapat disebut sebagai tenaga atau kekuatan (*energy atau power*) (Sedarmayanti, 2015).

Sejalan dengan pendapat Edwards III (dalam Subarsono, 2014), sumber daya merupakan salah satu variabel yang berpengaruh terhadap implementasi kebijakan. Meskipun substansi kebijakan telah disampaikan secara jelas dan konsisten, pelaksanaannya tidak akan berjalan efektif apabila tidak didukung oleh sumber daya yang memadai. Sumber daya tersebut mencakup sumber daya manusia, khususnya kompetensi para pelaksana kebijakan, serta sumber daya finansial. Sumber daya menjadi faktor yang sangat penting dalam mewujudkan efektivitas implementasi kebijakan, karena tanpa dukungan sumber daya, kebijakan hanya akan menjadi dokumen tertulis tanpa realisasi nyata. Hal ini juga sejalan dengan pandangan Van Meter dan Van Horn (dalam Subarsono, 2014:) yang menyatakan bahwa implementasi kebijakan memerlukan dukungan sumber daya, baik sumber daya manusia (*human resources*) maupun sumber daya nonmanusia (*non-human resources*).

Pelaksanaan PPDB online di SMK Al Badar tidak hanya didukung oleh ketersediaan sumber daya dari instansi terkait, seperti pihak sekolah dan Dinas Pendidikan, tetapi juga melibatkan sumber daya manusia dari masyarakat, khususnya orang tua peserta didik, sebagai bagian dari partisipasi publik. Kemampuan orang tua dalam memahami dan mengikuti prosedur pendaftaran secara daring turut menentukan keberhasilan pelaksanaan program PPDB online. SMK Al Badar juga

memiliki operator khusus yang bertugas menangani dan mengelola proses PPDB online.

Salah satu faktor penting dalam pengelolaan kebijakan yang berkualitas adalah tingginya tingkat partisipasi publik. Partisipasi tersebut bertujuan untuk mempertemukan berbagai kepentingan, baik yang sejalan maupun yang berbeda, dalam suatu proses perumusan dan penetapan kebijakan secara proporsional bagi seluruh pihak yang terlibat serta terdampak oleh kebijakan tersebut. Keterlibatan masyarakat secara luas dalam proses pengambilan keputusan merupakan cara yang efektif untuk menampung dan mengakomodasi beragam kepentingan yang ada (Sinambela, 2016).

Selain sumber daya manusia, pelaksanaan kebijakan di SMK Al Badar juga didukung oleh sumber daya nonmanusia berupa komputer beserta perangkat keras dan lunaknya, server, serta jaringan internet. Selanjutnya, sumber pendanaan dalam pelaksanaan kebijakan tersebut berasal dari dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Hal ini sejalan dengan hasil penelitian Handani (2020) yang menyatakan bahwa keberhasilan implementasi suatu kebijakan didukung oleh ketersediaan sumber daya manusia dan sumber daya nonmanusia.

### **c. Disposisi**

Disposisi dalam penelitian ini berkaitan dengan komitmen para pelaksana kebijakan. Komitmen tersebut ditunjukkan melalui alasan implementor dalam melaksanakan kebijakan, tujuan atau perubahan yang ingin diwujudkan, serta perubahan yang telah dicapai oleh para implementor dalam pelaksanaan kebijakan publik PPDB online di SMK Al Badar. Kebijakan PPDB online ini bertujuan untuk melaksanakan penerimaan peserta didik baru secara adil serta memberikan pelayanan yang ramah kepada masyarakat.

Van Horn (dalam Subarsono, 2021) menjelaskan bahwa disposisi implementor mencakup tiga aspek, salah satunya adalah sikap atau tanggapan para pelaksana terhadap suatu kebijakan. Sikap tersebut berpengaruh terhadap kemauan pelaksana dalam mengimplementasikan kebijakan. Para implementor kebijakan menunjukkan respons yang positif terhadap kebijakan yang diterapkan. Mereka memandang bahwa kebijakan tersebut memiliki tujuan yang baik, sehingga seluruh implementor melaksanakannya sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing.

Aspek kedua berkaitan dengan tingkat pemahaman implementor terhadap kebijakan. Di lingkungan Dinas Pendidikan, pemahaman mengenai kebijakan disampaikan kepada seluruh staf yang terlibat dalam implementasi melalui pelibatan mereka dalam setiap rapat yang membahas PPDB. Apabila terdapat staf yang tidak dapat menghadiri rapat, maka pada kesempatan lain staf yang hadir akan menyampaikan kembali hasil dan poin-poin pembahasan rapat tersebut. Dengan demikian, seluruh staf yang memiliki tanggung jawab dapat memahami kebijakan yang diterapkan. Aspek ketiga adalah intensitas disposisi implementor, yaitu kecenderungan atau preferensi nilai yang dimiliki oleh pelaksana kebijakan. Penulis memaknai intensitas disposisi implementor sebagai tingkat kekuatan sikap dan komitmen para implementor dalam melaksanakan kebijakan.

Panitia PPDB online SMK Al Badar telah menunjukkan komitmen yang baik dalam melaksanakan kebijakan PPDB berbasis daring. Meskipun masih terdapat beberapa panitia yang belum sepenuhnya profesional dalam menjalankan tugasnya, kekurangan tersebut dapat diimbangi dan ditutupi oleh panitia lainnya.

#### **d. Struktur Birokrasi**

Struktur birokrasi memiliki peranan yang sangat penting dalam pelaksanaan kebijakan, yang mencakup dua aspek utama, yaitu mekanisme kerja dan struktur organisasi pelaksana yang dituangkan dalam Standar Operasional Prosedur (SOP). Dalam kaitannya dengan implementasi kebijakan PPDB online pada jenjang SMP di Kabupaten Buleleng, mekanisme pelaksanaannya mulai dari tahap perencanaan, pendataan calon peserta didik, proses pendaftaran, seleksi, hingga penetapan calon peserta didik menjadi peserta didik di sekolah tujuan dapat dilaksanakan dengan prosedur yang tidak terlalu kompleks.

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara, penulis memperoleh temuan bahwa seluruh pelaksana PPDB online di SMK Al Badar telah menjalankan tugas sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang berlaku. Jalur komunikasi yang diterapkan juga tergolong jelas dan tidak memberatkan pihak mana pun, baik dalam koordinasi antara panitia dengan Dinas Pendidikan, antara kepala sekolah dengan panitia, maupun antara masyarakat dengan panitia PPDB online SMK Al Badar.

## **2. Faktor Pendukung dan Penghambat Implementasi**

Implementasi kebijakan pelayanan publik Penerimaan Peserta Didik Baru di SMK Al Badar dipengaruhi oleh berbagai faktor yang mendukung maupun menghambat pelaksanaannya. Adapun faktor-faktor yang mendukung implementasi kebijakan pelayanan publik Penerimaan Peserta Didik Baru tersebut antara lain sebagai berikut:

### **a. Adanya Partisipasi Publik Dalam Proses PPDB Online**

Partisipasi diartikan sebagai keterlibatan individu atau kelompok masyarakat dalam proses pembangunan, baik melalui penyampaian pendapat maupun melalui tindakan nyata, seperti memberikan sumbangan pemikiran, tenaga, waktu, keahlian, dana, dan/atau material, serta turut memanfaatkan dan menikmati hasil pembangunan (Pipit Mulyah, Dyah Aminatun, Sukma Septian Nasution, Tommy Hastomo, Setiana Sri Wahyuni Sitepu, 2020).

Dalam konteks ini, partisipasi yang dimaksud adalah keterlibatan masyarakat atau orang tua peserta didik dalam mengikuti proses pendaftaran secara online untuk menjadi peserta didik di SMK Al Badar. Partisipasi masyarakat tersebut muncul sebagai bentuk kebutuhan akan pendidikan, yang diwujudkan melalui keikutsertaan dalam proses pendaftaran peserta didik baru secara daring serta kepatuhan terhadap prosedur yang berlaku sesuai dengan ketentuan dalam Permendikbud.

### **b. Keberadaan Standar dan Tujuan Kebijakan**

Pelaksanaan PPDB online dilaksanakan berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada jenjang Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah

Kejuruan(Sunggal & Nainggolan, 2025). Dalam pelaksanaannya, PPDB online di SMK Al Badar dilakukan melalui jalur zonasi, afirmasi, perpindahan tugas orang tua/wali, serta jalur prestasi.

Selain adanya faktor-faktor yang mendukung implementasi kebijakan pelayanan publik Penerimaan Peserta Didik Baru di SMK Al Badar, terdapat pula beberapa faktor yang menghambat pelaksanaannya, yaitu sebagai berikut:

**a. Adanya Calon Peserta Didik Baru yang Berada di Luar Zonasi**

Adanya calon peserta didik baru yang berada di luar zonasi di SMK Al Badar menyebabkan petugas atau operator mengalami kendala dalam proses penginputan data. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, calon peserta didik yang berada di luar zonasi akan didaftarkan secara manual setelah proses PPDB online selesai ditutup. Kondisi ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Sheila Rohmah (2020) yang menyatakan bahwa penerimaan peserta didik melalui sistem zonasi dilakukan dengan memanfaatkan pendaftaran secara online, sedangkan penerimaan peserta didik yang berada di luar zonasi dilaksanakan melalui mekanisme tersendiri (Setyowati & Yahya, 2023).

**b. Kurangnya Sosialisasi Mengenai PPDB Online**

Minimnya kegiatan sosialisasi kepada masyarakat menyebabkan orang tua peserta didik kurang memahami tata cara pengisian formulir pendaftaran secara online. Kondisi tersebut berdampak pada kesulitan yang dialami petugas dalam proses penginputan data, seperti perbedaan antara daerah asal dan domisili peserta didik, Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang tidak terdaftar dalam sistem, serta masih sulitnya mengubah pola pikir masyarakat terkait penerapan sistem zonasi. Hal ini sejalan dengan pendapat Sutaryo (2014) yang menyatakan bahwa sosialisasi merupakan mata rantai terpenting di antara sistem sosial lainnya, karena melalui sosialisasi terjadi keterlibatan individu maupun kelompok dalam suatu sistem untuk berpartisipasi (Putra et al., 2023).

## **SIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan pelayanan publik Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) secara daring di SMK Al Badar telah berjalan cukup baik. Hal ini terlihat dari aspek komunikasi yang berlangsung efektif antara Dinas Pendidikan, pihak sekolah, panitia PPDB, dan masyarakat, sehingga informasi PPDB dapat diakses dengan jelas. Dari sisi sumber daya, pelaksanaan kebijakan didukung oleh ketersediaan sumber daya manusia, sarana dan prasarana teknologi, serta pendanaan yang bersumber dari dana BOS. Disposisi pelaksana menunjukkan komitmen dan sikap positif dalam menjalankan kebijakan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing. Selain itu, struktur birokrasi dan penerapan Standar Operasional Prosedur (SOP) telah dilaksanakan secara konsisten.

Meskipun demikian, masih terdapat kendala berupa calon peserta didik di luar zonasi serta kurangnya sosialisasi kepada masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan sosialisasi dan penguatan koordinasi agar pelaksanaan PPDB online ke depan dapat berjalan lebih optimal dan merata.

## DAFTAR PUSTAKA

- Akmad, A. A., Ansari, M. I., & Rahim, S. (2022). Implementasi Kebijakan Publik Penerimaan Peserta Didik Baru (Ppdb) Online Di Sma Negeri 3 Bulukumba. *Universitas Muhammadiyah Makassar*, 1(6), 1800–1814.
- Dwiyanto, A. (2021). *Reformasi birokrasi publik di Indonesia*. Ugm Press.
- Dye, T. R. (1992). Understanding public policy. (No Title).
- Edwards, G. C. (1980). Implementing public policy. (No Title).
- Ismail, M., & Yulvianda, R. (2022). Implementasi Sistem Informasi Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) di SMA N 6 Tanjung Jabung Timur. *Jurnal Informatika Dan Rekayasa Komputer(JAKAKOM)*, 2(2), 216–224. <https://doi.org/10.33998/jakakom.2022.2.2.102>
- Khoironi, K., Murhayati, S., & Zamsiswaya, Z. (2022). Implementasi Manajemen Sumber Daya Manusia untuk Meningkatkan Kinerja Guru di SMP IT Imam Syafi'i dan Insan Utama Pekanbaru. *AL-USWAH: Jurnal Riset Dan Kajian Pendidikan Agama Islam*, 5(1), 60–73. <https://doi.org/10.24014/au.v5i1.12291>
- Mariani, N. K., Sihotang, E., & Sukardi, N. M. R. (2024). Kewenangan Komite Sekolah dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan Berdasarkan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Universitas Mahendradatta , Indonesia berhenti dan selesai . Berbagai konsep dan wawasan baru akan terus berproses seiring respon secara tepa. *Jurnal Kajian Dan Penelitian Umum*, 2(5), 51–52.
- Mazmanian, D. A., & Sabatier, P. A. (1983). Implementation and Public Policy (Glenview, IL: Scott, Foresman). *MazmanianImplementation and Public Policy*.
- Pipit Mulyah, Dyah Aminatun, Sukma Septian Nasution, Tommy Hastomo, Setiana Sri Wahyuni Sitepu, T. (2020). Partisipasi Masyarakat Dalam Perencanaan Pembangunan Di Kampung Pintareng Kecamatan Tabukan Selatan Tenggara Diradimalata. *Journal GEEJ*, 7(2), 14–24.
- Putra, C. G. A. K., Sulandari, S., Luh Putu Suastini, N., & Kadek Sadu Astuti, N. (2023). Implementasi Kebijakan Pelayanan Publik Penerimaan Peserta Didik Baru Di Sekolah Dasar No 6 Abiansemal Kabupaten Badung Provinsi Bali. *Kebijakan : Jurnal Ilmu Administrasi*, 14(1), 73–82. <https://doi.org/10.23969/kebijakan.v14i1.6089>
- Safrida, S., Iskandar, I., & Marisa, R. (2025). Manajemen Masa Pengenalan Lingkungan (Mpls) Terhadap Penyesuaian Diri Siswa Di Sd Negeri 1 Nisam Antara. *Jurnal Review Pendidikan Dan Pengajaran*, 8(1), 1808–1816. <https://doi.org/10.31004/jrpp.v8i1.41993>
- Setyowati, E., & Yahya, F. A. (2023). Manajemen Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Jalur Prestasi Dalam Peningkatan Prestasi Siswa di SMP Negeri 1 Jetis Ponorogo. *Edumanagerial*, 2(1), 1–13.
- Sunggal, D. I. S., & Nainggolan, L. (2025). *ONLINE JENJANG PENDIDIKAN MENENGAH PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU ADMINISTRASI PUBLIK PASCASARJANAUNIVERSITAS MEDAN AREA MEDAN ONLINE JENJANG PENDIDIKAN MENENGAH Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Administrasi Publik pada Pascasarjana Universitas Medan Area. 1.*
- Winarno, B. (2014). Kebijakan Publik: Teori, Proses dan Studi Kasus. Yogyakarta. *Center of Academic Publishing Service*.